



Mengembangkan Teori Keynesian untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan

Linda Fatmawati^{1*}, Angga Rosidin², Zakaria Habib Al-Ra'zie³

¹⁻³Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Serang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Jakarta Km 5No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota. Serang, Banten, 42183

*Korespondensi penulis: lindafatmawati206@gmail.com

Abstract. *The current global economic situation is facing various complex challenges, including climate change, economic inequality, and technological revolution. The Keynesian theory, which emphasizes the active role of government in stabilizing the economy, remains relevant for designing adaptive and sustainable economic policies. This article discusses the development of Keynesian theory in addressing future challenges, focusing on green investment, equitable redistribution policies, and strengthening technological innovation. The research method used is a descriptive qualitative literature study with thematic analysis of national and international scientific sources. The findings indicate that the renewal of Keynesian theory should not only aim at maintaining short-term stability but also support long-term sustainability by emphasizing the synergy between fiscal policy, technological innovation, and social justice.*

Keywords: *Keynesian Theory, Sustainable Economy, Green Investment, Redistribution, Technological Innovation.*

Abstrak. Situasi perekonomian dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan rumit, termasuk perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan revolusi teknologi. Teori Keynesian, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menstabilkan perekonomian, menjadi relevan untuk merancang kebijakan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Artikel ini membahas pengembangan teori Keynesian dalam menghadapi tantangan masa depan, dengan fokus pada investasi hijau, kebijakan redistribusi yang adil, dan penguatan inovasi teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif deskriptif dengan analisis tematik terhadap sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan teori Keynesian harus diarahkan bukan sekedar menjaga kestabilan dalam jangka pendek, melainkan juga mendukung kesinambungan dalam jangka panjang, dengan menekankan sinergi antara kebijakan fiskal, inovasi teknologi, dan keadilan sosial.

Kata kunci: Teori Keynesian, Ekonomi Berkelanjutan, Investasi Hijau, Redistribusi, Inovasi Teknologi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global di abad ke-21 ditandai dengan beragam persoalan yang semakin rumit, yang mencakup perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan kemajuan teknologi yang pesat. Permasalahan ini menuntut respons kebijakan yang cepat dan efektif dari pemerintah serta pelaku ekonomi (Fatmawati et al., 2024). Pendekatan Keynesian tetap relevan karena menyoroti peran aktif pemerintah dalam menstabilkan perekonomian, terutama dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal dan moneter secara bersama. Menurut Keynes, ketika ekonomi mengalami resesi atau perlambatan, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran publik dan mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan pertumbuhan ekonomi (Purba et al., 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh mekanisme pasar saja.

Selain itu, teori Keynesian menekankan pentingnya pengelolaan suku bunga dan likuiditas dalam sistem keuangan. Dengan mengatur suku bunga, pemerintah dan bank sentral dapat mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga membantu menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini menganggap bahwa pasar tidak selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis, sehingga intervensi diperlukan untuk menghindari krisis dan pengangguran yang tinggi.

Dalam konteks modern, penerapan kebijakan Keynesian terbukti efektif dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, termasuk resesi global dan pandemi. Pemerintah dapat menggunakan stimulus fiskal besar-besaran dan kebijakan moneter ekspansif untuk meningkatkan permintaan dan mengurangi dampak negatif terhadap lapangan kerja serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa peran negara sangat penting dalam memastikan kestabilan ekonomi dalam waktu dekat serta memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, teori Keynesian tetap relevan karena memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan praktis dalam mengelola ekonomi makro. Dengan menekankan intervensi pemerintah, teori ini menawarkan solusi yang adaptif terhadap ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global saat ini. Oleh karena itu, pendekatan ini terus menjadi dasar dalam formulasi kebijakan ekonomi di berbagai negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer (Bonaraja Purba et al., 2024).

2. LANDASAN TEORI KEYNESIAN

Teori Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 dalam karyanya yang terkenal "The General Theory of Employment, Interest and Money," menegaskan bahwa perekonomian tidak selalu mampu mencapai keseimbangan penuh secara otomatis. Keynes berargumen bahwa fluktuasi permintaan agregat dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, termasuk pengangguran dan resesi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah menjadi sangat penting dalam mengelola ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Meiriza et al., 2024).

Dalam kerangka Keynesian, pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak merupakan instrumen utama untuk mengatur permintaan agregat. Ketika ekonomi mengalami perlambatan, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial, untuk merangsang permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, saat ekonomi overheating, pengurangan pengeluaran dan peningkatan

pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Nurhayana dan Soebagiyo (2023), kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi pemerintah dan investasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengaruh dari APBN sendiri tidak selalu signifikan secara langsung. Hal ini sejalan dengan pandangan Keynes bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat membantu mengatasi ketidakstabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan saat pasar gagal menyesuaikan diri secara otomatis

Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga menjadi bagian integral dari teori Keynesian (Purba et al., 2024) . Dengan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga, otoritas moneter dapat mempengaruhi besarnya investasi dan konsumsi masyarakat. Penurunan suku bunga, misalnya, akan meningkatkan investasi dan konsumsi, sehingga memperkuat permintaan agregat. Dalam konteks masa depan, pengelolaan kebijakan moneter harus mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan global seperti volatilitas pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi (Keynes, J. M, 1936)

Selain itu, dalam konteks tantangan global saat ini seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial yang semakin meningkat, kebijakan ekonomi harus lebih responsif dan adaptif. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada stabilisasi ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial. Misalnya, investasi dalam energi bersih dan program sosial dapat membantu mengurangi ketimpangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sriyalatha & Torii, 2019).

Keynes menegaskan bahwa perekonomian tidak selalu mampu mencapai keseimbangan otomatis, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam kondisi ini, mekanisme pasar cenderung gagal menyesuaikan diri secara cepat dan efektif, sehingga menyebabkan pengangguran tinggi dan penurunan pendapatan secara luas. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi sangat penting untuk menstabilkan ekonomi dan mencegah resesi berkepanjangan. Keynes menekankan bahwa pemerintah harus aktif menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang permintaan agregat, seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan suku bunga, agar ekonomi kembali ke tingkat output potensialnya

Dalam konteks masa depan, teori Keynesian perlu dikembangkan untuk memasukkan aspek keberlanjutan lingkungan. Investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari stimulus fiskal yang tidak hanya

mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutannya (Lase et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Keynesian yang menekankan peran pemerintah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengatasi Ketimpangan Sosial melalui Kebijakan Keynesian

Ketimpangan sosial yang semakin melebar menjadi tantangan besar di era modern (Khoirul, 2024). Penggunaan kebijakan fiskal untuk redistribusi kekayaan, seperti penggunaan pajak progresif dan skema bantuan sosial mampu menekan kesenjangan serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat (Prasetyo, 2021). Dengan demikian, teori Keynesian tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan keadilan sosial, yang menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi membuka peluang baru dalam pengelolaan ekonomi berbasis prinsip Keynesian. Penggunaan data besar dan kecerdasan buatan dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi kebijakan yang lebih akurat dan cepat dalam merespon perubahan ekonomi. Teknologi ini juga memungkinkan pengembangan instrumen fiskal dan moneter yang lebih efisien dan transparan (Lase et al., 2024).

Krisis keuangan global, pandemi, dan ketidakpastian geopolitik menunjukkan perlunya pengembangan teori Keynesian yang lebih fleksibel dan inovatif. Kebijakan stimulus yang adaptif dan kolaborasi internasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Pendekatan ini menegaskan bahwa teori Keynesian harus mampu bertransformasi sesuai dengan dinamika global yang kompleks.

Pengembangan teori Keynesian masa depan juga memerlukan sinergi dengan pendekatan ekonomi lain, seperti ekonomi hijau, ekonomi sosial, dan ekonomi digital. Integrasi ini akan memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Pendekatan multidisipliner ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, pengembangan teori Keynesian untuk menghadapi tantangan masa depan harus bersifat inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal dan moneter harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan global, termasuk isu keberlanjutan dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, teori Keynesian tidak hanya relevan tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang tangguh dan menjunjung keadilan di masa mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan kebijakan yang membahas pengembangan teori Keynesian di Indonesia dan dunia. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui pencarian yang terorganisir dalam basis data seperti Google Scholar, dan situs lembaga resmi pemerintahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara teori Keynesian dan penerapannya dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan, khususnya dalam hal investasi hijau, redistribusi pendapatan, dan penguatan inovasi teknologi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Investasi Hijau

Investasi hijau menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan (Dira et al., 2024). Pemerintah dapat mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan inovasi teknologi hijau guna mengurangi dampak perubahan iklim (Fatmawati et al., 2024). Studi oleh Sari dan Pramudyo (2020) menunjukkan bahwa investasi pada sektor energi terbarukan di Indonesia mampu mendorong ekspansi ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru.

Peningkatan investasi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Investasi tidak hanya menitikberatkan pada dimensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta sosial. Pemerintah memegang peranan strategis dalam merancang kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, misalnya melalui pengembangan energi terbuka, sistem transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang optimal. Dengan demikian, investasi hijau dapat menjadi penggerak utama dalam mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi negara (Dira et al., 2024).

Selain peran pemerintah, sektor swasta juga semakin aktif dalam mendukung ekonomi hijau melalui investasi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Perusahaan dan investor menyadari bahwa keberlanjutan tidak hanya penting untuk menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing jangka panjang. Investasi ini membuka peluang ekonomi baru, seperti pengembangan energi bersih dan inovasi teknologi ramah lingkungan, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Peningkatan

aliran dana ke sektor energi bersih menunjukkan bahwa pasar global semakin mengakui potensi ekonomi dari ekonomi hijau, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan (Sitepu & Hasibuan, 2025).

Studi oleh Aldi Friyatna Dira et al. (2024) menunjukkan bahwa investasi pada sektor energi terbarukan di Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyediakan kesempatan kerja tambahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan investasi hijau tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menunjukkan pengaruh yang konstruktif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran.

Lebih jauh lagi, investasi hijau dapat mempercepat peralihan menuju sistem ekonomi rendah emisi yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Melalui inovasi teknologi dan pengembangan sumber energi baru, negara dapat mengurangi ketergantungan pada sumber bahan bakar fosil yang terbatas dan mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini sejalan dengan target global dalam mengatasi perubahan iklim dan memenuhi komitmen internasional seperti Perjanjian Paris.

Akhirnya, keberhasilan peningkatan investasi hijau sangat bergantung pada kerjasama yang sinergis antara kalangan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat luas. Pemberian insentif melalui kebijakan, kemudahan perizinan, serta edukasi tentang manfaat investasi hijau harus terus diperkuat. Dengan sinergi yang baik, investasi hijau dapat merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan masa depan yang lebih hijau, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan Redistribusi yang Lebih Adil

Ketimpangan ekonomi dapat dikurangi dengan menerapkan reformasi pajak, menyediakan jaminan sosial, serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut penelitian oleh Prasetyo (2021), redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal di Indonesia terbukti efektif dalam menurunkan ketimpangan sosial (Khoirul, 2024).

Kebijakan redistribusi yang lebih adil merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia (Khoirul, 2024). Reformasi pajak yang progresif, perlindungan sosial yang inklusif, serta perluasan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem redistribusi yang efektif dan berkeadilan. Menurut penelitian (Lestianto, 2024), redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal di Indonesia terbukti mampu menurunkan ketimpangan sosial secara

signifikan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengenaan pajak yang lebih adil, tetapi juga pada distribusi manfaat yang merata kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program sosial yang terintegrasi (Lestianto, 2024).

Namun, pelaksanaan kebijakan redistribusi di Indonesia tidak tanpa tantangan. Sistem pajak yang ada dinilai masih belum efisien dan cenderung membebani masyarakat berpendapatan rendah lebih berat dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. Selain itu, maraknya tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan utama dalam proses redistribusi pendapatan, karena mengurangi efektivitas penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk program sosial dan pembangunan. Oleh karena itu, reformasi sistem perpajakan dan penguatan sistem pengawasan menjadi hal penting agar redistribusi dapat berjalan secara optimal dan transparan (Prasetyo, 2021).

Dampak dari kebijakan redistribusi pajak sendiri cukup beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikenakan pada golongan atas kemudian didistribusikan kepada golongan bawah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Dana dari pajak tersebut dapat dialokasikan guna mendanai berbagai program sosial seperti sektor pendidikan, layanan medis, dan bantuan kesejahteraan lainnya yang bermanfaat langsung bagi masyarakat berpendapatan rendah. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan pengawasan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Selain melalui pajak, pemerintah juga melakukan redistribusi pendapatan dengan cara lain, seperti penarikan dana dari masyarakat melalui berbagai instrumen fiskal. Contohnya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disusun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. UU ini bertujuan menciptakan mekanisme pajak yang lebih adil dan mendorong kepatuhan sukarela dari para wajib pajak, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan yang melibatkan reformasi fiskal, program sosial, dan reformasi struktural sangat diperlukan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang ketat, redistribusi dapat menjadi instrumen yang mampu mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil, harmonis, serta bersifat inklusif, sehingga dapat mewujudkan tantangan ekonomi dunia serta dinamika sosial di masa mendatang.

Penguatan Inovasi dan Teknologi

Penguatan inovasi dan teknologi merupakan kunci utama dalam menjadi penggerak utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan di era saat ini. Riset dan pengembangan (R&D) yang intensif akan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat memperbaiki kinerja serta efisiensi di beragam sektor industri. Sebagaimana dijelaskan oleh Lase et al. (2024), penerapan inovasi teknologi tidak sekedar memperkuat daya saing nasional di tingkat global, namun juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi berjangka panjang (Lase et al., 2024).

Selain itu, inovasi teknologi berperan penting dalam memperluas lapangan kerja, terutama di bidang-bidang yang tengah tumbuh cepat, misalnya ekonomi digital serta energi terbarukan. Teknologi digital, termasuk AI, big data, dan IoT, memungkinkan terciptanya pola bisnis inovatif yang lebih efisien. Hal ini selain membuka peluang kerja baru, juga berkontribusi pada peningkatan mutu pekerjaan dan pendapatan, sebagaimana dipaparkan oleh World Economic Forum (2020).

Pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau juga menjadi fokus utama dalam memperkuat inovasi. Teknologi energi bersih, seperti energi surya dan angin, bisa menekan penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil sekaligus menurunkan emisi karbon secara signifikan. Penerapan teknologi energi bersih berperan signifikan dalam mendukung upaya internasional menekan dampak perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru di bidang energi hijau.

Lebih jauh lagi, riset dan pengembangan harus didukung oleh kebijakan yang pro-inovasi, termasuk insentif fiskal, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan industri dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Lase et al., 2024).

Akhirnya, penguatan inovasi dan teknologi harus diiringi dengan penguatan kapasitas SDM melalui program pendidikan serta pelatihan yang sesuai kebutuhan. Kurikulum yang adaptif dan berbasis keterampilan digital akan mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di industri masa depan. Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia berpotensi menjadi pusat inovasi teknologi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju 2045 yang kompetitif di tingkat global dan inklusif.

Relevansi Teori Keynesian di Era Modern

Sinergi antara kebijakan fiskal yang responsif, investasi hijau, serta kebijakan sosial progresif yang berorientasi pada kemajuan bersama telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil sekaligus berwawasan lingkungan di beberapa negara maju (Fatmawati et al., 2024). Di Indonesia, pendekatan ini dapat diadopsi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Relevansi teori Keynesian di era modern tetap sangat signifikan (Purba et al., 2024), terutama dalam konteks menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini. Teori Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat melalui kebijakan fiskal aktif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dalam situasi krisis ekonomi global maupun domestik, pendekatan ini terbukti efektif dalam menstabilkan perekonomian dan mendorong pemulihan.

Perpaduan antara kebijakan fiskal yang dinamis, investasi hijau, dan kebijakan sosial progresif menegaskan bahwa pendekatan keynesian tidak sekedar fokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menitikberatkan pada keberlanjutan serta pemerataan hasil pembangunan. Investasi hijau, misalnya, dapat meningkatkan lapangan kerja sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kebijakan sosial progresif menjamin agar hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh semua kelompok masyarakat, sekaligus mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan angka kemiskinan (Khoirul, 2024).

Di Indonesia, penerapan prinsip Keynesian dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional yang sedang berkembang. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan dan infrastruktur sosial. Pendekatan ini juga dapat membantu mengatasi dampak pandemi dan ketidakpastian ekonomi global, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan kebijakan fiskal yang responsif, investasi hijau berkelanjutan, serta kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan berpotensi memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional. Negara-negara maju yang telah mengadopsi strategi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan dapat dicapai secara bersamaan. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga mampu menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, relevansi teori Keynesian di era modern tidak hanya terbatas pada pengelolaan siklus ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan kebijakan fiskal aktif, investasi hijau, dan kebijakan sosial progresif, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkeadilan dan ramah lingkungan di masa depan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Keynesian masih sangat relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemajuan teknologi. Penguatan peran aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang inovatif termasuk investasi hijau, redistribusi pendapatan yang lebih adil, dan penguatan inovasi teknologi menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di Indonesia, integrasi antara kebijakan sosial progresif dan transformasi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing nasional. Oleh karena itu, pengembangan teori Keynesian yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial perlu terus didorong sebagai fondasi menuju visi Indonesia Maju 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Friyatna Dira, K., Utomo, K. P., Bangun, M. F. A., Pramularso, E. Y., & Syarief, F. (2024). Pengaruh investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1442–1446.
- Fatmawati, L., Rosidin, A., & Al-Ra'zie, Z. H. (2024, Mei). Mengembangkan teori Keynesian untuk menghadapi tantangan ekonomi masa depan. *Opini Publik*, Universitas Pamulang Serang. <https://divisinews.com/opini-publik-mengembangkan-teori-keynesian-untuk-menghadapi-tantangan-ekonomi-masa-depan/>
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Khoirul, F. A. A. (2024). Analisis kebijakan redistribusi pendapatan dan perubahan sosial-ekonomi: Studi kasus kesejahteraan di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 1–8.
- Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 114–129.
- Lestianto, A. (2024). Kebijakan redistribusi fiskal dan dampaknya terhadap keadilan sosial. *Jurnal Alfiasi: Kajian Sosial Ekonomi*, 6(1), 45–58.

- Meiriza, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Teori ekonomi Keynesian mengenai inflasi dan pengaruhnya terhadap ekonomi modern. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 2433–2445.
- Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. (2020). Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 5(1), 73–77.
- Nurhayana, E., & Soebagiyo, D. (2023). Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008–2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 106–119.
- Prasetyo, A. (2021). Efektivitas kebijakan fiskal dalam menurunkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 33–42.
- Purba, B., Wijaya, M. F., Lumbantobing, M., & Ardhana, M. B. (2024). Pemikiran ekonomi politik Keynesian dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 76–83.
- Sari, N., & Pramudyo, B. (2020). Investasi energi terbarukan dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201–210.
- Sitepu, D. E. M., & Hasibuan, B. (2025). Dampak ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1065–1075.
- Sriyalatha, M. A. K., & Torii, H. (2019). Impact of fiscal policy on economic growth: A comparison between Singapore and Sri Lanka. *Kelaniya Journal of Management*, 8(1), 37–56. <https://doi.org/10.4038/kjm.v8i1.7559>
- World Economic Forum. (2020). The future of jobs report 2020. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>